

KETIDAKADILAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) BAGI MAHASISWA

Yanti Hutasoit¹, Debora Banjar Nahor², Erni S. Sianturi³, Lara Sati⁴, Nelly Theresia Simatupang⁵

¹⁻⁵ Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Medan

Email: larasatilubis0088@gmail.com

ABSTRAK

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan mereka. Namun, ketidaktepatan sasaran masih terjadi dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana KIP-K didistribusikan dan apakah mahasiswa yang membutuhkannya benar-benar menerimanya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi tetap berkonsentrasi pada dokumen pendapatan tanpa memeriksa aset, kondisi tempat tinggal, atau verifikasi lapangan. Akibatnya, mahasiswa yang sebenarnya mampu tidak terdaftar tetapi masih menerima KIP-K, sementara mahasiswa yang benar-benar membutuhkannya tidak. Tidak hanya penghasilan orang tua yang dapat digunakan untuk menentukan perbedaan dalam kondisi keuangan siswa, tetapi juga harus ada lebih dari itu. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem seleksi KIP-K harus diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan objektif.

Kata Kunci: KIP-K, ketidaktepatan sasaran, seleksi penerima.

ABSTRACT

The Indonesia Smart College Card (KIPK) program helps students from low-income families continue their education. However, its implementation still suffers from inaccurate targeting. The purpose of this study was to determine how the KIPK is distributed at UNIMED and whether students who need it are actually accepted. The study used a qualitative descriptive approach, collecting data through observation, documentation, and interviews. The results showed that the selection process remains focused on income documents without examining assets, living conditions, or field verification. As a result, students who are truly unable to afford it still receive the KIPK, while those who are truly unable to do so are excluded. Parental income alone can be used to determine differences in students' financial circumstances; more should be done. Overall, this study suggests that the KIPK selection system needs to be improved to be more targeted and objective.

Keywords: KIP-K, inaccurate targeting, recipient selection.

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pendidikan menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan komponen penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan memberi orang kesempatan untuk memperoleh keterampilan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam banyak hal. Menurut Nurul et al. (2024), dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik suatu negara dipengaruhi langsung oleh pendidikan. Dengan kata lain, peningkatan kualitas pendidikan sangat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional. Akibatnya, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara menerima kesempatan pendidikan yang sama dan berkualitas. Ayat 1 Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Namun, kesenjangan akses ke pendidikan masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia. Karena keterbatasan biaya, banyak warga negara, terutama mereka dari kelompok ekonomi rendah, tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Kondisi ini menunjukkan hubungan antara kemiskinan dan pendidikan: kemiskinan dapat menghambat akses ke pendidikan, dan pendidikan yang rendah dapat memperpanjang lingkaran kemiskinan. Pemerintah menyadari bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya bergantung pada penyediaan fasilitas; kebijakan afirmatif yang membantu siswa yang kurang mampu juga penting (Dinayanti et al, 2022).

Pemerintah mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP), termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), untuk mengatasi masalah ini. Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, program ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa baru yang berprestasi tetapi memiliki keterbatasan keuangan (Nurul et al., 2024). Diharapkan bahwa KIP-K akan memberi siswa kurang mampu kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ini akan membantu mobilitas sosial dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dengan bantuan teknologi informasi, proses pendaftaran kini lebih mudah dan cepat di website resmi Kemendikbud Ristek. Ini meningkatkan akses masyarakat luas ke pendidikan.

Namun, kemudahan ini menimbulkan masalah baru juga. Dalam beberapa kasus, pendaftar berusaha membuat data diri, kondisi keuangan, dan dokumen pendukung menjadi salah agar mereka terlihat layak untuk mendapatkan beasiswa. Fenomena ini menunjukkan perilaku tidak etis yang bertentangan dengan nilai kejujuran akademik dan merugikan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dari sudut pandang sosiologi, konsep dramaturgi dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan tersebut. Dramaturgi mengacu pada upaya seseorang untuk menampilkan citra tertentu kepada publik untuk mencapai tujuan tertentu (Anggun et al., 2023). Dalam situasi ini, pendaftar berusaha menampilkan "peran sebagai mahasiswa yang tidak mampu", meskipun kenyataannya adalah situasi yang sangat berbeda. Sangat penting untuk menyelidiki fenomena manipulasi data penerima beasiswa ini karena berkaitan dengan integritas akademik, keadilan sosial, dan keberhasilan kebijakan pemerintah. Analisis fenomena ini juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan pendidikan diterapkan di lapangan dan seberapa baik sasaran utamanya, yaitu memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang mereka.

METODE PENELITIAN

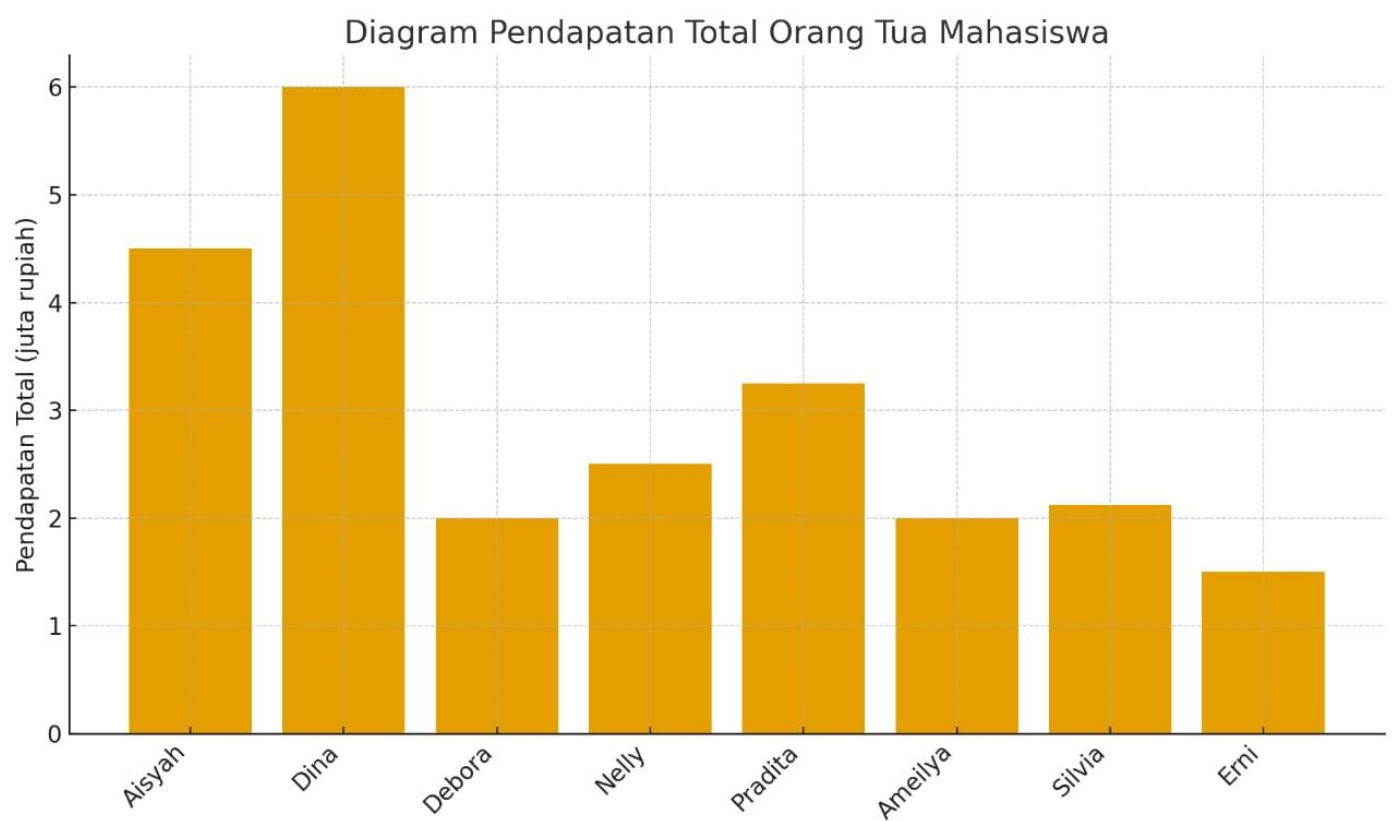
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena manipulasi data dalam pendaftaran Beasiswa KIP-Kuliah. Penelitian dilakukan di lingkungan kampus dengan melibatkan mahasiswa penerima KIP-Kuliah serta mahasiswa lain yang mengetahui atau terkait dengan fenomena tersebut. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih mahasiswa yang dinilai dapat memberikan informasi yang diperlukan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap kehidupan sehari-hari mahasiswa, dan dokumentasi mengenai proses pendaftaran beasiswa. Data yang diperoleh dianalisis melalui proses penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tingkat ketepatan data dijaga dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber serta menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Seluruh kegiatan penelitian dilakukan dengan tetap menjaga etika penelitian, termasuk kerahasiaan informan dan persetujuan sebelum pengumpulan data dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas bagaimana KIPK disalurkan dan menilai apakah bantuan itu benar-benar sampai ke mahasiswa yang memerlukannya. Berdasarkan data yang terkumpul, terlihat bahwa proses penyaluran sudah sesuai dengan pedoman administratif, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Beberapa masalah muncul karena proses seleksi lebih berfokus pada dokumen yang diunggah ketimbang memeriksa keadaan mahasiswa secara langsung. Situasi ini menyebabkan hasil penerimaan tidak menggambarkan kondisi ekonomi mahasiswa dengan akurat.

Berikut beberapa perbandingan data-data ekonomi mahasiswa:

Nama	Pekerjaan Ayah	Pekerjaan Ibu	Penghasilan Orangtua	Tanggungan	Status Rumah	Kendaraan	Penerima KIP-K
Aisyah	Petani	Petani	5 juta/bln	1	Pribadi	3 motor	Ya
Dina	Petani	wiraswasta	7 juta/bln	2	Pribadi	5 motor	Ya
Debora	Petani	IRT	2 juta/bln	6	Pribadi	1 motor	Tidak
Nelly	Petani	Ibu	2,5 juta/bln	4	Pribadi	1 motor	Tidak
Pradita	Petani	IRT	3,5 juta/bln	4	Pribadi	1 motor	ya
Ameilya	Petani	Petani	2 juta/bln	2	Pribadi	1 motor	Tidak
Silvia	Petani	Petani	2,5 juta/bln	8	Numpang	Tidak ada	Ya
Erni	Petani	IRT	1,5 juta/bln	2	Pribadi	2 motor	Tidak



Berdasarkan data pada tabel, kondisi ekonomi mahasiswa ternyata sangat bervariasi dan tidak bisa hanya dinilai dari penghasilan orang tua. Terdapat mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan pendapatan baik namun memiliki sedikit tanggungan, sehingga keuangan keluarga mereka masih stabil. Sebaliknya, ada mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah namun memiliki tanggungan besar. Perbedaan-perbedaan ini menjadikan penilaian hanya berdasarkan pendapatan menjadi tidak cukup untuk menentukan kelayakan mendapatkan KIPK.

Temuan selanjutnya mengungkapkan bahwa ada mahasiswa yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori ekonomi lemah, tetapi masih menerima KIPK. Contohnya, Aisyah dan Dina yang memiliki banyak aset seperti motor dan ruko, serta tidak memiliki banyak tanggungan keluarga. Dalam konteks ini, mereka tidak berada dalam posisi yang paling memerlukan bantuan. Namun, keduanya masih berhasil lolos seleksi, yang menunjukkan bahwa proses verifikasi belum mencakup semua indikator ekonomi secara menyeluruh.

Di sisi lain, terdapat juga mahasiswa yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar. Contoh terlihat pada Debora dan Nelly, yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan menanggung banyak anggota keluarga. Meskipun berada dalam kondisi sulit secara finansial, mereka tidak ada dalam daftar penerima bantuan. Kasus seperti ini menyoroti adanya ketidaktepatan dalam sistem seleksi yang menyebabkan mahasiswa yang sangat membutuhkan bantuan terlewatkan. Ini menunjukkan bahwa proses seleksi belum dapat mengidentifikasi mahasiswa dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Namun, penelitian ini juga menemukan penerima yang sesuai dengan kriteria, seperti Silvia. Dengan orang tua berpendapatan rendah, memiliki banyak tanggungan, dan tidak memiliki kendaraan, kondisi Silvia mengindikasikan bahwa ia layak menerima bantuan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan proses seleksi bekerja sesuai dengan tujuannya, meskipun masih belum menyeluruh.

Secara umum, masalah ketidaktepatan ini lebih disebabkan oleh kelemahan dalam sistem seleksi ketimbang faktor individu. Proses penilaian masih berfokus pada dokumen pendapatan, tanpa pemeriksaan terhadap aset atau kondisi tempat tinggal. Selain itu, tidak terdapat mekanisme verifikasi lapangan atau pemeriksaan silang untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat. Kurangnya transparansi juga membuat mahasiswa tidak mengetahui alasan mereka diterima atau ditolak dalam program KIPK, sehingga proses itu terasa tidak terbuka dan kurang objektif.

Solusi yang dijelaskan dalam poster sangat sejalan dengan hasil penelitian ini. Poster tersebut menekankan pentingnya sistem seleksi yang lebih transparan, indikator penilaian yang lebih lengkap, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Dengan penerapan perbaikan tersebut, seleksi KIPK akan lebih terarah karena mempertimbangkan lebih banyak aspek dalam mengevaluasi kondisi ekonomi mahasiswa. Sehingga, mahasiswa yang benar-benar memerlukan bantuan akan lebih mudah dikenali dan terbantu. Umumnya, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun program KIPK telah dilaksanakan, sistem distribusinya perlu ditingkatkan agar lebih tepat dan adil. Masih terdapat mahasiswa yang mampu mendapat bantuan serta mahasiswa dari keluarga miskin yang tidak terpilih, yang menunjukkan bahwa kriteria penilaian perlu diperluas dan diperketat. Modifikasi dalam proses pemilihan, seperti pencatatan aset, kunjungan untuk verifikasi, atau pemberian bobot pada variabel ekonomi, akan membuat penyaluran bantuan menjadi lebih efisien dan lebih tepat sasaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) masih mengalami masalah dalam penentuan sasaran. Proses pemilihan yang hanya mengandalkan dokumen pendapatan tanpa adanya pemeriksaan di lapangan mengakibatkan beberapa mahasiswa yang seharusnya tidak menerima bantuan, tetap mendapatkannya, sedangkan mahasiswa yang benar-benar memerlukan justru tidak mendapatkannya. Beragam kondisi ekonomi mahasiswa tidak bisa dinilai hanya dengan satu ukuran, seperti penghasilan orang tua, sehingga diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif. Temuan ini menegaskan pentingnya memperbaiki sistem seleksi dan validasi data dengan menambahkan ukuran seperti kepemilikan aset, jumlah anggota keluarga yang ditanggung, serta kondisi tempat tinggal, serta meningkatkan transparansi dalam proses penerimaan. Dengan adanya perbaikan ini, distribusi KIPK diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan kesempatan yang adil bagi mahasiswa yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diniyati, A. I., Fadillah, G., Anggina, L., Prasetya, R., Salsabila, S., Morowati, S. E., & Rozak, R. W. A. (2022). Pola pengeluaran penerima beasiswa KIP Kuliah: Prioritas penggunaan dana antara kebutuhan esensial dan gaya hidup. *JIMaKeBiDi: Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital*, 1(2), 77-88. <https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v1i2.77>
- Khairunnisa, N. J., Ahmad, A. N., Raihan, M., Azri, A., & Fattah, A. A. (2024). Prinsip keadilan dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 13(1).
- Triyas, A. P. A., Maulida, D. R. W., & Nathania, E. C. A. (2023). Realitas tersembunyi: Praktik dramaturgi mahasiswa penerima beasiswa KIPK. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 253-267. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.809>